

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Alma, Buchari 2017. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Asmuni dan Siti Mujiatun 2013. *Bisnis Syariah*. Medan: Perdana Publishing.
- Hartanta, Anis Siti. 2015. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Gosyen Publikasi.
- Mulazid, Ade Sofyan 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Poniaman, Budhi dan Achmad Choerudin 2018. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Prihanto, Hendi 2018. *Etika Bisnis Dan Profesi (Sebuah Pencarian)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Putra, Indar Mahardika 2018. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Yogyakarta: Quadtrant.
- Soemitra, Andri 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhardi, Taufik Makarao dan Fauziah 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta Barat: Kademia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus 2017. *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thomas dan Norman 2017. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.geogle.co.id/search?safe=strict=kegiatanislam.blogspot.com,2013/06> 17 Maret 2013 Pukul 12.00).

Undang – Undang :

UU No 10 tahun 1998 menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dari lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 dalam pasal 2 menyatakan bahwa Pegadaian adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha untuk menyalurkan fasilitas pendanaan dalam membangun perekonomian masyarakat.

UU No 51 Tahun 2011 dalam pasal 5 berbicara tentang tujuan Pegadaian.

Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 pasal 6 juga dijelaskan bahwa perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan dilaksanakan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang bergerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

Selain Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011, peraturan Pemerintah dalam UU No 5 Tahun 1999 juga berbicara tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada UU No 99 Tahun 1998 tentang bidang / jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang / jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemintraan Presiden Republik Indonesia.

Menurut UU No 20 tahun 2008 usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan dengan implementasi Keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah RI No.178 tahun 1961, tentang pendirian perusahaan Pegadaian.

Melalui peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, tentang perusahaan negara pegadaian menjadi jawatan pegadaian.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990, tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum.

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011, tentang perubahan untuk perusahaan umum menjadi perusahaan persero.